

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kалан

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman: 09
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



H Nuryakin

Pemprov Sambut Baik Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD 2022

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD 2022, yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan RI. Hal itu disampaikan Sekda Kalteng H Nuryakin ketika hadir dalam Entry Meeting pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Kalteng 2022 di aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/3).

Ditambahkan Sekda, pemeriksaan atas LKPD merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Nuryakin ketika membacakan sambutan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menuturkan, Pemprov Kalteng terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Pihaknya sendiri telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh opini terbaik atas Laporan Keuangan terkait. “Atas kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah yang ada, pada TA 2021 yang lalu, Pemprov Kalteng memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ujarnya.

Sekda menambahkan, pihaknya bertekad, berupaya dan berharap agar dapat mempertahankan Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022. Melalui pemeriksaan ini diharapkan juga bersama BPK RI, pemprov juga dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta segenap jajarannya agar dapat mempersiapkan segala urusan administratif yang diperlukan, bersikaplah kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan juga informasi yang akurat, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Diinstruksikan juga agar sementara waktu Kepala Perangkat Daerah tidak keluar daerah, kecuali ada hal yang sangat mendesak, dan harus seizin dari pimpinan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subauditorat Kalteng I Tukino mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng menyampaikan salah satu penilaian indikator untuk Opini WTP adalah komitmen Pemerintah Daerah.

“Maka ketika komitmen itu di nilai oleh tim tinggi, scoring juga tinggi. Salah satu indikatornya adalah entry meeting. Apakah Entry Meeting itu dihadiri atau diikuti oleh seluruh jajaran,” ujarnya mengakhiri.

drn